



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Telp. (0261) 201354 Fax
(0261) 201354 Email. Bappenda.sumedang@gmail.com
Sumedang**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pelaksanaan tugas pokok pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang serta memberikan gambaran tentang sasaran dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Perubahan Rencana kerja ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran dan rencana target kinerja dengan indikator yang ingin dicapai pada tahun 2023 disertai dengan indikasi pendanaannya. Dengan Perubahan Rencana kerja ini, Kami berharap dapat dijadikan kerangka acuan bagi seluruh komponen khususnya pimpinan dan pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kegiatan menuju tercapainya Visi dan Misi Badan pada khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya.

Sumedang, Juli 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

ROHANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730315 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		ii	
DAFTAR TABEL		iii	
DAFTAR BAGAN		iv	
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	5
		1.3 Maksud dan Tujuan	
BAB	II	EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
		2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
		2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	
		2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB	IV	PENUTUP	

DAFTAR TABEL		
TABEL	2.1	Evaluasi Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II
TABEL	3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Hasil Infut SIPD)
TABEL	3.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Kertas Kerja Exel usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif).....

DAFTAR BAGAN

BAGAN	1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	
-------	---	--	--

--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/LINTAS Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4355)
 5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomo 4576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Jabar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat)
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);
49. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 tahun 2021 tentang uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 195);
50. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).
51. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2023 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rumusan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah :

- a. Sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- b. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN,**
- 1.1 Latar Belakang**
 - 1.2 Landasan Hukum**
 - 1.3 Maksud dan Tujuan**

BAB II	:	EVALUASI RENJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
		2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
		2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II
		2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023 Triwulan Kedua, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke dua belas, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Daerah dari target Rp. **2.910.895.610.288,00** terealisasi sebesar Rp. 1.281.309.132.861,64 atau 44,02%. Pencapaian diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 Program dan 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 22 Sub Kegiatan
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 12 Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan. Pada Semester Pertama tahun 2023 ini terdapat 34 Sub Kegiatan dari 8 Kegiatan dan 2 Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Kebijakan/Tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adanya kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan. Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Alokasi dana anggaran untuk program kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Anggaran : Rp. 40.150.000
Realisasi Anggaran : Rp. 25.467.300
Kinerja Anggaran : 63,43 %
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target Anggaran : Rp. 10.190.000
Realisasi Anggaran : Rp. 3.600.000
Kinerja Anggaran : 35,33 %
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Target Anggaran : Rp. 6.590.000
Realisasi Anggaran : -
Kinerja Anggaran : -
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Target Anggaran : Rp. 4.700.000
Realisasi Anggaran : -
Kinerja Anggaran : -
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Target Anggaran : Rp. 5.900.000
Realisasi Anggaran : -
Kinerja Anggaran : -
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Anggaran : Rp. 46.300.000
Realisasi Anggaran : Rp. 20.703.670
Kinerja Anggaran : 25,30
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target Anggaran : Rp. 9.778.097.477
Realisasi Anggaran : Rp. 4.340.801.295
Kinerja Anggaran : 44,39
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Target Anggaran : Rp. 8.919.660
Realisasi Anggaran : Rp. 5.623.000
Kinerja Anggaran : 63,04
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Target Anggaran : Rp. 15.456.520
Realisasi Anggaran : Rp. 7.888.900
Kinerja Anggaran : 51,04

10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Target Anggaran : Rp. 35.355.000
 - Realisasi Anggaran : Rp. 17.660.000
 - Kinerja Anggaran : 51,04
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Target Anggaran : Rp. 449.091.360
 - Realisasi Anggaran : Rp. 175.710.610
 - Kinerja Anggaran : 39,13
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Target Anggaran : Rp. 23.116.590
 - Realisasi Anggaran : Rp. 13.869.400
 - Kinerja Anggaran : 60,00 %
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Target Anggaran : Rp. 116.720.696
 - Realisasi Anggaran : Rp. 58.538.000
 - Kinerja Anggaran : 50,15 %
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Target Anggaran : Rp. 313.223.200
 - Realisasi Anggaran : Rp. 252.091.100
 - Kinerja Anggaran : 80,48 %
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Target Anggaran : Rp. 18.000.000
 - Realisasi Anggaran : Rp. 9.000.000
 - Kinerja Anggaran : 50,00 %
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Target Anggaran : Rp. 267.230.000
 - Realisasi Anggaran : Rp. 173.067.850
 - Kinerja Anggaran : 64,76 %
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Target Anggaran : Rp. 44.313.914
 - Realisasi Anggaran : Rp. 27.801.800
 - Kinerja Anggaran : 62,74 %
18. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - Target Anggaran : Rp. 400.000.000
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0
 - Kinerja Anggaran : 0

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Target Anggaran : Rp. 243.549.240
Realisasi Anggaran : Rp. 137.328.139
Kinerja Anggaran : 56,51 %
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Target Anggaran : Rp. 1.619.450.000
Realisasi Anggaran : Rp. 840.521.150
Kinerja Anggaran : 51,90 %
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Target Anggaran : Rp. 242.950.000
Realisasi Anggaran : Rp. 168.570.300
Kinerja Anggaran : 69,38 %
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Target Anggaran : Rp. 24.873.820
Realisasi Anggaran : Rp. 24.857.200
Kinerja Anggaran : 99,93 %
23. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Target Anggaran : Rp. 200.626.900
Realisasi Anggaran : Rp. 85.273.100
Kinerja Anggaran : 42,64 %
24. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Target Anggaran : Rp. 643.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 463.783.140
Kinerja Anggaran : 72,13 %
25. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 104.129.700
Realisasi Anggaran : Rp. 69.323.200
Kinerja Anggaran : 66,57 %
26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 357.760.500
Realisasi Anggaran : Rp. 166.106.380
Kinerja Anggaran : 46,43 %
27. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 424.482.300
Realisasi Anggaran : Rp. 253.512.00
Kinerja Anggaran : 59,72 %

28. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 665.956.500
- Realisasi Anggaran : Rp. 336.814.300
- Kinerja Anggaran : 50,58 %
29. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Target Anggaran : Rp. 31.430.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 0
- Kinerja Anggaran : 0
30. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 41.626.500
- Realisasi Anggaran : Rp. 18.196.200
- Kinerja Anggaran : 43,71 %
31. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 365.865.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 170.842.236
- Kinerja Anggaran : 46,70 %
32. Penagihan Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 1.776.011.920
- Realisasi Anggaran : Rp. 601.137.500
- Kinerja Anggaran : 33,85 %
33. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 100.174.600
- Realisasi Anggaran : Rp. 48.483.300
- Kinerja Anggaran : 48,40 %
34. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Target Anggaran : Rp. 230.187.000.
- Realisasi Anggaran : Rp. 34.878.600
- Kinerja Anggaran : 15,15 %

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 195 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
- b. Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengendalian operasional, pengelolaan PBB dan BPHTB, pengelolaan pajak lainnya, non pajak, pengendalian dan pembinaan;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara Internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur;
- c. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- e. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- f. menyelenggarakan analisa potensi pendapatan daerah;
- g. mengendalikan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah;
- h. menyelenggarakan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- j. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. membina dan mengevaluasi pencapaian target pajak daerah skala kabupaten;
- l. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah;

- m. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan di bidang pendapatan Daerah dengan Instansi atau pihak lainnya yang terkait;
- n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Daerah
 - 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan ;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - 3. Kepala Jabatan Fungsional

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;

- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur layanan Badan Pendapatan Daerah dan pada lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Pendapatan Daerah;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pendapatan Daerah;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Pendapatan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang perencanaan dan pengembangan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Merumuskan penyusunan rencana pendapatan daerah
 - g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - k. menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan pihak terkait dalam perumusan dan penyelenggaraan teknis kebijakan pendapatan daerah
 - l. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - m. merumuskan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - n. merumuskan strategi pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
 - o. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. menyelenggarakan pendataan, penilaian, pemutakhiran dan evaluasi pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi pajak daerah dan retribusi daerah
 - g. merumuskan pengelolaan data objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. menyelenggarakan penelitian dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. merumuskan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan pengendalian implementasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan pajak daerah dan

- h. retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - k. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - m. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan penertiban pajak daerah
 - n. menyelenggarakan proses keberatan dan banding, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah
 - o. menyelenggarakan proses restitusi dan kompensasi Pajak Daerah
 - p. menyelenggarakan penetapan pajak daerah dan penagihan piutang Pajak Daerah
 - q. menyelenggarakan fasilitasi penyitaan objek Pajak Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan
 - r. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pelaporan pendapatan daerah;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya
- (5) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.

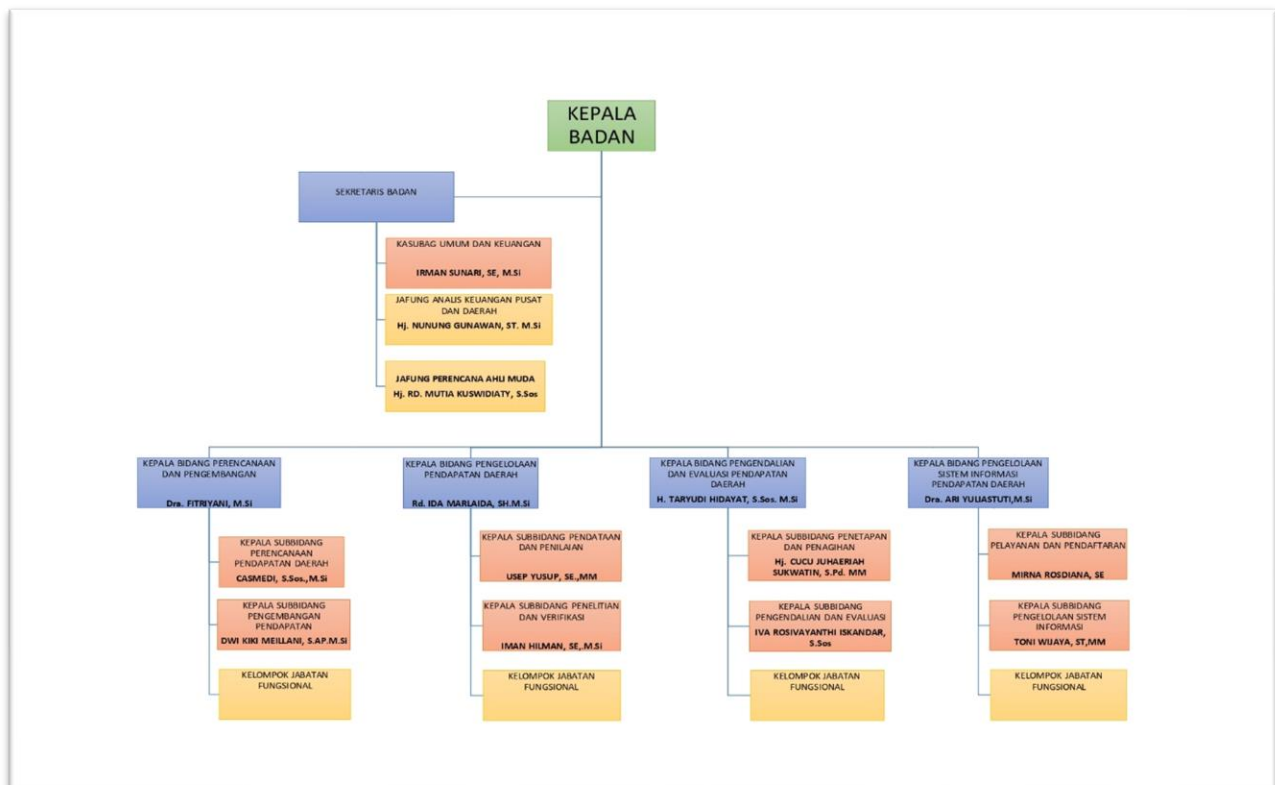
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan bidang pengelolaan sistem information pendapatan daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- e. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;

- f. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. merumuskan pedoman teknis tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan basis data pajak daerah
- l. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
- m. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah
- n. menyelenggarakan pelayanan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah
- o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021



Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 46,16 %, adapun realisasi belanja keseluruhan anggaran sebesar Rp. **8.652.779.312,00** dari total anggaran sebesar Rp. **18.743.177.477,00**

Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/ sasaran pada Renstra. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Renja (Rencana Kerja) Triwulan II Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRA M AKHIR PERIODE (RENSTR A SKPD) TAHUN 2018/2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARA N KEGIATAN S/D TAHUN (n- 3)2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRA M DAN KEGIATA N (RENJA SKPD TAHUN n- 1) 2023	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n- 2)2022	REALISA SI RENJA SKPD TAHUN (n- 2) 2022	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATA N S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-	TINGKAT CAPAIAN REALISAS I TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
	Pengelolaan Pendapatan Daerah													
5	2	4	2	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	10	4	4	1	4	18	5
				02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6	4	6	4	1	6	14	2
				03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	243	160	160	1	1	404	404

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM AKHIR PERIODE (RENSTRA SKPD) TAHUN 2018/2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3)2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJAN SKPD TAHUN n-1) 2023	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJAN SKPD TAHUN (n-2)2022	REALISASI RENJAN SKPD TAHUN (n-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Alat Perekam Transaksi di Wajib Pajak	98	45	88	88	1	98	231	2
	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	20000	43100	43000	1	10	63.010	6.301
	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	20000	6000	6000	1	12	26.012	2.168
	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.000	1	-	-	-	1.000	1.001	1
	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	277	9	9	1	12	298	25
	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	12000	12	12	1	11	12.023	1.093
	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	6	6	6	1	12	24	2,00

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumedang terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan. Kondisi pendapatan daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul perlu diambil langkah langkah yang nyata dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sektor penerimaan yang potensial namun belum optimal diupayakan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang upaya dimaksud antara lain :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah utama dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa perencanaan yang baik suatu organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu permasalahan dalam perencanaan penganggaran adalah belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Untuk itu diperlukan adanya sinkronsasi dan penyesuaian terhadap struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Aspek Pendapatan Daerah

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama masih minimnya wajib pajak yang mau melakukan pembayaran secara langsung dan menghitung secara *self assessment*. Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum berfungsinya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) sebagai aparat penegak hukum bagi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan perlu terus ditingkatkan agar mampu

menganalisis sumber-sumber potensi pendapatan daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan dengan proporsi terbesar terhadap APBD. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan perlu terus ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta akurasi data potensi pendapatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah, Dana Tunjangan Profesi Guru dan Dana Desa perlu terus ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah.

3. Isu – isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan serta belum adanya tenaga administrasi pemeriksa pajak;
2. Penanganan piutang pajak yang belum optimal;
3. Belum dilakukan pemutakhiran data sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak;
4. Kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah belum optimal serta ;
5. ketaatan Wajib Pajak masih belum optimal.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa strategi untuk mengatasi isu-isu dimaksud dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Tahun 2023.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang , diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN/ HAMBATAN	SOLUSI
1	Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pajak keliling; 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah; 3. Peningkatan kompetensi pegawai; 4. Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 5. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;

2	Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1. Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan
		2. Pemeliharaan system informasi perpajakan;
		3. Pendidikan dan pelatihan sistem informasi pajak daerah;
		4. Sosialisasi layanan pajak;
		5. Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan pajak daerah.
3	kesadaran subjek pajak daerah masih rendah	sosialisasi tentang kewajiban perpajakan terhadap subjek pajak daerah
4	Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah	peningkatan kompetensi pegawai serta sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah
5	Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur	penyempurnaan regulasi pajak daerah
6	Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah	Pemutakhiran peta blok/SIG
		Pemutakhiran data objek pajak daerah lainnya
7	Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda	memenuhi data dukung potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pengembangan fitur aplikasi
8	Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah	Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa;
		pembinaan terhadap SDM di Bapenda baik secara kuantitas dan kualitas
		Penyampaian surat ketetapan pajak daerah secara tepat waktu
		Peningkatan Intensitas dan kecepatan proses himbauan dan penagihan pajak daerah
9	Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah	sosialisasi mengenai ketentuan dan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak daerah
10	Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar	pengendalian pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
		koordinasi dengan tim atau instansi penegak peraturan daerah di sektor pajak daerah
		penertiban subjek/objek pajak daerah
11	terdapatnya data piutang yang tidak valid	Rekonsiliasi data piutang/realisasi pajak daerah
		pemutakhiran data piutang realisasi pajak daerah
		pengembangan sistem pajak daerah
12	belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah	penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pendapatan daerah
13	belum optimalnya penggalan potensi pendapatan	Kajian penggalan potensi pendapatan
14	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah	Sosialisasi dan penyuluhan

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan pada fungsi pendapatan adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah misi ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang yaitu Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggung Jawab secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Kondisi perekonomian daerah belum mendukung peningkatan pendapatan daerah	1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung; 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah; 3. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat; 4. Adanya potensi pajak; dan 5. Adanya potensi pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi.
2	Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten;	
3	Adanya wajib pajak yang belum taat.	

d. **Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**

1. Merumuskan Kapasitas Perencanaan serta Program dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pajak yang transparan dan berkualitas
3. Memperluas Basis Data Potensi Penerimaan Pajak Daerah
4. Mengoptimisasikan Proses Pemungutan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bidang Pendapatan Daerah selain bertugas mengelola pajak dan retribusi juga sebagai koordinator dalam penerimaan PAD yang dikelola OPD, harus mampu menggali semua potensi-potensi penerimaan yang ada, mengkoordinir agar OPD penghasil dapat mengoptimalkan penerimaan yang dikelolanya dan menjalankan fungsinya membantu tugas Bupati dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tentunya tugas ini cukup berat, terutama optimalisasi dari pajak daerah karena 70% penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.

Rencana Kerja Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adapun rincian program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 tertuang ke dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02	KEUANGAN														18,743,177,477	28,345,335,877		28,233,000,000		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														13,714,177,477	18,871,037,477		15,845,000,000	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														113,830,000	113,830,000		385,000,000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40,150,000	40,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10,190,000	10,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	30,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6,590,000	6,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	40,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4,700,000	4,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 %	35,000,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5,900,000	5,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 %	30,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	46,300,000	46,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100 %	150,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,802,473,657	9,802,473,657			10,565,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan		100 %	100 %	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	3 Laporan	3 Laporan	9,778,097,477	9,778,097,477	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	10,400,000,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	8,919,660	8,919,660	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	35,000,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan		100 %	100 %	14 Laporan	14 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,456,520	15,456,520	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	130,000,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										35,355,000	585,355,000				160,000,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	100 %	1 Paket	4 Dokumen	4 Dokumen		0	342,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	0
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	35,355,000	43,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	60,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	100 %	1 Orang	1 Orang	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	100,000,000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	100 %		114 Orang	4 Dokumen	4 Dokumen	0	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	0	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,231,695,760	2,638,225,760			2,067,000,000			
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	449,091,360	699,091,360	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	550,000,000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	23,116,590	38,116,590	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	175,000,000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	116,720,696	216,720,696	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	250,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	313,223,200	783,223,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	18,000,000	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	18,000,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	267,230,000	667,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	44,313,914	44,313,914	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	74,000,000
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	100 %		1 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 9 Dokumen	0	151,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	0
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											400,000,000	2,967,330,000			200,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %		2 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	0
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %		7 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	341,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	0
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %		5 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	0
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %		20 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	0
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	200,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	100 %		0 Unit 1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen		0	101,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,862,999,240	2,225,999,240			1,968,000,000				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen		243,549,240	324,549,240	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	300,000,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen		1,619,450,000	1,901,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	1,668,000,000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										267,823,820	537,823,820			500,000,000				
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	100 %	72 Unit	72 Unit	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 6 Dokumen		242,950,000	362,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	400,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	2 Dokumen	2 Dokumen	24,873,820	74,873,820	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	100,000,000			
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	100 %	1 Unit		2 Dokumen	2 Dokumen	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	0			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											5,029,000,000	9,474,298,400			12,388,000,000				
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											5,029,000,000	9,474,298,400			12,388,000,000				
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	200,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	300,000,000			
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	643,000,000	843,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,500,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	104,129,700	179,129,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	250,000,000	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	98 Unit	98 Unit	100 %	100 %	357,760,500	677,760,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	595,000,000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	424,482,300	850,482,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,200,000,000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Baisi Data Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	665,956,500	1,665,956,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	2,200,000,000	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	100 %	100 %	31,430,000	112,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	300,000,000	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	41,626,500	41,626,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	147,000,000	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	11 Layanan	11 Layanan	100 %	100 %	365,865,000	565,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	700,000,000	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	3000 Doku men	3000 Doku men	100 %	100 %	100,174,600	151,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	265,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1,753,521,400	3,596,424,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	4,000,000,000	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	56,000,000	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	341,053,500	341,053,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	425,000,000	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	250,000,000	
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	85 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	200,000,000	
TOTAL												18,743,177,477	28,345,335,877					28,233,000,000

Secara rinci nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Capaian target dan Kebutuhan dana Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan maju Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

**RENCANA USULAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN DALAM RANCANGAN PERUBAHAN RKP/RENJA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN	
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG				
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)								PERUBAHAN RKP/RENJA Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02	KEUANGAN			26.362.119.342	18.743.177.477			28.175.335.877	9.432.158.400	APBD Kab		26.045.406.177	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.242.799.342	13.714.177.477			18.701.037.477	4.986.860.000	APBD Kab		18.009.837.477	
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		226.219.750	113.830.000		113.830.000	-	APBD Kab		113.830.000	
5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda	2 Dokumen	75.000.000	40.150.000	Bappenda	2 Dokumen	40.150.000	40.150.000
					Penyusunan Renstra								APBD Kab	
					Penyusunan Rencana kerja								APBD Kab	
					Forum SKPD								APBD Kab	
5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Bappenda	1 Dokumen 1 Dokumen	11.531.440	10.190.000	Bappenda	1 Dokumen 1 Dokumen	10.190.000	10.190.000
					Penyusunan Pra RKA 2023								APBD Kab	
					Penyusunan RKA 2023								APBD Kab	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN				
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG							
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)			PERUBAHAN RKPD/RENJA Th. 2023								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13					
5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	10.748.260	6.590.000		2 Dokumen	6.590.000	-	APBD Kab	Lanjutan	6.590.000
					Penyusunan Pra Perubahan RKA 2022										APBD Kab		
					Penyusunan Perubahan RKA 2022										APBD Kab		
5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappenda	1 Dokumen 1 Dokumen	10.623.290	4.700.000	Bappenda	1 Dokumen 1 Dokumen	4.700.000	-	APBD Kab	Lanjutan	4.700.000
					Penyusunan DPA 2023										APBD Kab		
5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	13.316.760	5.900.000		2 Dokumen	5.900.000	-	APBD Kab		5.900.000
					Penyusunan Perubahan DPA 2022										APBD Kab		
5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda	4 Dokumen	105.000.000	46.300.000	Bappenda	4 Dokumen	46.300.000	-	APBD Kab	FIX ADUM Lanjutan	46.300.000
					Monev Capaian Kinerja										APBD Kab		
					SAKIP, RB dan ZI										APBD Kab		
					Penyusunan LAKIP										APBD Kab		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja										APBD Kab		
					Penyusunan LKPJ										APBD Kab		
					Penyusunan LPPD										APBD Kab		
					Penyusunan SKM										APBD Kab		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN				
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG							
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)			PERUBAHAN RKPD/RENJA Th. 2023								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13				
5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda	4 Laporan	500.000.000	313.223.200	Bappenda	4 Laporan	783.223.200	470.000.000	APBD Kab	Lanjutan	783.223.200
					Pengadaan Barang Cetak Kantor Pertriwulan									APBD Kab			
5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda	4 Laporan	18.000.000	18.000.000	Bappenda	4 Laporan	38.000.000	20.000.000	APBD Kab	Lanjutan	38.000.000
					Langganan Jurnal / Surat Kabar/ Majalah									APBD Kab			
5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	12 Laporan	500.000.000	267.230.000	Bappenda	12 Laporan	667.230.000	400.000.000	APBD Kab	Lanjutan	667.230.000
					Perjalanan Dinas									APBD Kab			
5	02	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	12 Laporan	74.000.000	44.313.914	Bappenda	12 Laporan	44.313.914	-	APBD Kab	Lanjutan	44.313.914
					Pengelolaan Arsip Lainnya SKPD									APBD Kab			
					Pengelolaan Arsip Surat Menyurat SKPD									APBD Kab			
5	02	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	9 Dokumen	-	-	Bappenda	9 Dokumen	151.530.000	151.530.000	APBD Kab	Baru	151.530.000
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000	400.000.000			2.967.330.000	2.567.330.000	APBD Kab		2.276.130.000
5	02	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bappenda	5 Dokumen	-	-	Bappenda	2 unit	800.000.000	800.000.000	APBD Kab		600.000.000
5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bappenda	5 Dokumen	-	-	Bappenda	5 Dokumen	341.200.000	341.200.000	APBD Kab		150.000.000
5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Bappenda	2 Paket	-	-	Bappenda	2 Paket	25.000.000	25.000.000	APBD Kab	Baru	25.000.000
5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappenda	5 Dokumen	-	-	Bappenda	5 Dokumen	1.300.000.000	1.300.000.000	APBD Kab	Baru	1.000.000.000
5	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda	5 Dokumen	200.000.000	400.000.000	Bappenda	5 Dokumen	400.000.000	-	APBD Kab	Lanjutan	400.000.000
					Penataan Gedung Kantor, Pembuatan Nama dan Denah Gedung serta Perbaikan Backdrop Ruang Belakang Front Office Pembuatan Denah Gedung, nama-nama ruangan dalam gedung, pentunjuk arah dalam gedung, dan struktur organigram yang berbahan arklirik, serta merenovasi backdrop/dinding belakang front office									APBD Kab			
5	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda	1 Unit	-	-	Bappenda	1 Unit	101.130.000	101.130.000	APBD Kab	Lanjutan	101.130.000
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.918.000.000	1.862.999.240			2.225.999.240	363.000.000	APBD Kab		2.225.999.240
5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bappenda	12 Laporan	250.000.000	243.549.240	Bappenda	12 Laporan	324.549.240	81.000.000	APBD Kab	Lanjutan	324.549.240
					Belanja Tagihan Telepon dan Listrik									APBD Kab			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN				
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG							
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)			PERUBAHAN RKPD/RENJA Th. 2023								
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13		
5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda	12 Laporan	1.668.000.000	1.619.450.000	Bappenda	12 Laporan	1.901.450.000	282.000.000	APBD Kab	Lanjutan	1.901.450.000
					Honorarium Outsourcing Tenaga Kebersihan dan Pengamanan									APBD Kab			
					Honorarium Narasumber Taklim Aparatur									APBD Kab			
					Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Umum Kantor									APBD Kab			
					Lembur									APBD Kab			
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355.000.000	267.823.820			537.823.820	270.000.000	APBD Kab		537.823.820
5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	4 Laporan	300.000.000	242.950.000	Bappenda	4 Laporan	362.950.000	120.000.000	APBD Kab	Lanjutan	362.950.000
					Belanja Bahan Bakar dan Pelumas									APBD Kab			
					Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan									APBD Kab			
					Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 dan 2									APBD Kab			
5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappenda	6 Dokumen	55.000.000	24.873.820	Bappenda	6 Dokumen	74.873.820	50.000.000	APBD Kab	Lanjutan	74.873.820
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									APBD Kab			
5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda	6 Dokumen		-	Bappenda	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	APBD Kab	Lanjutan	100.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				10.119.320.000	5.029.000.000			9.474.298.400	4.445.298.400	APBD Kab		8.035.568.700
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				10.119.320.000	5.029.000.000			9.474.298.400	4.445.298.400	APBD Kab		8.035.568.700
5	02	04	2,01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200.000.000	200.000.000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	300.000.000	100.000.000	APBD Kab	Lanjutan	300.000.000
					Penyusunan Rencana Target Pendapatan Daerah (40 Perbup dan SOP)									APBD Kab			
					Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa									APBD Kab			
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah									APBD Kab			
5	02	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 2 Dokumen	900.000.000	643.000.000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen 2 Dokumen	843.000.000	200.000.000	APBD Kab	FIX URUSAN Lanjutan	743.000.000
					Pembahasan Kajian Potensi dan Kebijakan Pendapatan Daerah									APBD Kab			
					Intensifikasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah									APBD Kab			
					Pembahasan Kebijakan Pendapatan Daerah									APBD Kab			
					Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah									APBD Kab			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN				
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG							
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)								PERUBAHAN RKPD/RENJA Th. 2023	11=10-7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13					
5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Subjek Pajak Daerah Dalam Sistem	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Berkas	1.890.000.000	665.956.500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Berkas	1.665.956.500	1.000.000.000	APBD Kab	FIX URUSAN Lanjutan	725.000.000
					Pengembangan Aplikasi SIMPBB P2									APBD Kab			
					Pengembangan Aplikasi SIPPADU									APBD Kab			75.000.000
					Pembelian Server									APBD Kab			
					Pengembangan Aplikasi BPHTB									APBD Kab			
					Pemeliharaan Sistem PBB, BPHTB									APBD Kab			150.000.000
					Pengadaan Cetakan STTS Doubel, STTS Engkel, Countinous 4 play, Pita Printonik									APBD Kab			500.000.000
					Pengembangan E-Layanan									APBD Kab			
					Pengembangan Aplikasi E- Pembayaran									APBD Kab			
					Pengembangan Aplikasi Realisasi									APBD Kab			
					Pengembangan Dashboard									APBD Kab			
					Pemeliharaan Sistem Jarian Aplikasi Online									APBD Kab			
					Pengembangan Peta SIG (Bapenda dan BPN)									APBD Kab			
					Pengembangan Sistem Jaringan									APBD Kab			
					Pemeliharaan Printer Printonik									APBD Kab			
5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Penilaian PBB P2	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	117.565.000	31.430.000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	112.000.000	80.570.000	APBD Kab	Lanjutan	98.000.000
					Belanja Jasa Konsultasi Penilaian ZNT Kawasan pinggir jalan (Simpang,Pamulihan, Parakanmuncang,Kutamaya)									APBD Kab			98.000.000
					Sosialisasi tentang Kegiatan Penilaian ZNT									APBD Kab			
					Pendampingan/ Monitoring kegiatan Penilaian ZNT									APBD Kab			
					Evaluasi hasil pelaporan kegiatan pihak ketiga									APBD Kab			
5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang di tetapkan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis Pajak Daerah	147.000.000	41.626.500	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis Pajak Daerah	41.626.500	-	APBD Kab	Lanjutan	41.626.500
					Pengolahan Data Realisasi Pajak Daerah									APBD Kab			
					Penyampaian SKPD Pajak Lainnya									APBD Kab			
					Penetapan SK Keberatan SPPT PBB P2									APBD Kab			
					Penyampaian SK Keberatan SPPT PBB P2									APBD Kab			
5	02	04	2,01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan pelayanan pajak Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	500.000.000	365.865.000	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	565.865.000	200.000.000	APBD Kab	Lanjutan	565.865.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN	ANALISA KEBUTUHAN				
			LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.		LOKASI	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	BERTAMBAH/ BERKURANG							
					RKPD/RENJA Tahun 2023	APBD Tahun 2023 (Pergeseran Terakhir)			PERUBAHAN RKPD/RENJA Th. 2023								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-7	12	13					
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
											APBD Kab						
5	02	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Dokumen	163.000.000	100.174.600	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Dokumen	151.000.000	50.825.400	APBD Kab	Lanjutan	151.000.000
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penertiban Pajak Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan 6 Laporan	3.825.000.000	1.753.521.400	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan 6 Laporan	3.596.424.400	1.842.903.000	APBD Kab	FIX URUSAN Lanjutan	1.571.147.000
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		
															APBD Kab		1.521.147.000
															APBD Kab		50.000.000
5	02	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	56.000.000	-	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	-	-	APBD Kab	Lanjutan	

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumedang serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 28 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ROHANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730315 199303 1 005